

Daftar Pustaka

A. Literatur

Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Ketiga Revisi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Hukum Bisnis di Era Globalisasi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ibrahim, Jhony. 2006. *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implementasi Penerapannya di Indonesia)*. Bayu Media Publishing. Surabaya

Maulana. Budi Insan. 2000. *Catatan Singkat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Silalahi, Udin. 2006. *Perjanjian yang Dilarang*. Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sitompul, Asri. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerodibroto, Soenarto. 2002. *KUHP & KUHPA*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Komisi Nomor 01/KPPU/Per/IV/2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-42/A/2000 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Putusan

Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2008 tentang Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali Tahun Anggaran 2007.

Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2008 tentang Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD DR. Soeselo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007.

D. Internet

www.google.com

www.hukumonline.com

www.kppu.go.id